IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI

Oleh :
WAHYUNI[1*]
NIM: E1012141040
Arifin[2*]Bima Sujendra[2*]
[*]Email : e1012141040@student.untan.ac.id.

1. MahasiswaProgramStudiIlmuAdministrasiPublikFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik UniversitasTanjungpuraPontianak
2. DosenProgramStudiIlmuAdministrasiPublikFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasTanjungpuraPontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi Metodepenelitian yang digunakan adalah metode kualitatif denganjenispenelitian deskriptif. Penelitianini menggunakanteoriVan Meter & Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) yangterdiridari:1). Ukuran dan tujuan kebijakan, kesimpulan dari variabel ini ialah ukurannya sudah sesuai dilevel warga namun belum sesuai dengan tujuan karena masih terdapat penebangan hutan liar di kawasan konservasi 2). Sumber daya, kesimpulan dari variabel ini ialah sumberdaya manusianya masih kurang dan perlu penambahan tenaga khususnya pengawasan dilapangan 3). Karakteristik agen pelaksana, kesimpulan dari variabel ini ialah selaku implementor sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, namun belum bisa dikatakan maksimal, karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti isi dari kebijakan serta sanki-sanki yang terdapat dalam kebijakan tersebut4). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, kesimpulan dari variabel ini ialah komunikasi antar agen pelaksana masih sangat buruk karena kejelasan dari peraturan daerah itu sendiri tidak ada penunjukan secara spesifik instansi mana yang harus menjalankan kebijakan itu 5). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, kesimpulan dari variabel ini ialah faktor ekonomi sangat berpengaruh karena sebagian besar masalah penebangan liar yang terjadi dipicu oleh tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mendorong oknum untuk melakukan tindakan yang sangat merugikan tersebut. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti ialah, pada permasalahan komunikasi antar organisasi agar dapat memperbaiki hubungan komunikasi menjadi lebih baik dan lebih jelas untuk mencapai hasil akhir yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Selain itu masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mentaati peraturan yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci:Implementasi, Kebijakan, Kabupaten Konservasi

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 20 OF 2015 CONCERNING THE DESIGNATION OF KAPUAS HULU REGENCY AS A CONSERVATION DISTRICT

by
WAHYUNI[1*]
Student Number : E1012141040
Arifin[2*] *Bima Sujendra*[2*]
[*]*email : e1012141040@student.untan.ac.id.*

1. Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the policy of the Kapuas Hulu Regency Regulation No. 20 of 2015 concerning the Designation of Kapuas Hulu Regency as a Conservation District. The research method used was a qualitative method with a descriptive type of research. This research uses the theory proposed by Van Meter & Van Horn (in Agustino, 2008:142) which consists of: 1). The standards and objectives of the policy, the conclusion of this variable is that the standards are appropriate at the community level but are not in accordance with the objectives because there is still illegal logging in the conservation area 2). Resources, the conclusion of this variable is that human resources are still inadequate and they need to have additional personnel, especially regarding supervision on the location 3). Characteristics of implementing organizations, the conclusion of this variable is that the implementing organizations are already responsible for carrying out their duties, but it is still less than optimal, because there are still people who do not understand the contents of the policy and the sanctions mentioned in the policy 4). Communication between organizations and activities of the implementing organizations, the conclusion of this variable is that communication between implementing organizations is still very poor because the clarity of the Regional Regulations itself does not specify which organization should carry out the policy 5). Economic, social and political environment, the conclusion of this variable is that the economic factor is very influential because most of the problems of illegal logging are triggered by the community's poor economic condition so that it encourages people to take these destructive actions. The recommendations from this researcher are among others, with regard to communication between organizations, it should be improved so that the communiation will be better and clearer to achieve final results in accordance with the objectives of the policy itself. In addition, the community can also contribute by complying with the regulations that have been stipulated in the policy.

Keywords: Implementation, Policy, Conservation District

A. PENDAHULUAN

1. LatarBelakang Penelitian

Indonesia menrupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah hutan yang sangat luas, sampai saat ini Indonesia memiliki wilayah hutan seluas 124 juta hektar. Namun, sayangnya jumlah ini terusm mengalami penurunan dari tahun ke tahun, penyebabnya pun beragam mulai dari kebakaran hutan, ladang berpindah, serta *illegal logging*, bahkan dari kasus illegal logging terjadi dikawasan yang sangat intens yaitu terjadi di kawasan hutan konservasi. Hal ini merupakan indicator dari parahnya kerusakan hutan di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Masalah ini menuntut banyak pihak untuk andil dalam penyelesaiannya tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga dari masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terapat pada BAB I ketentuan umum pasal 1, ayat 1,2,3 dan 4 yang berbunyi:

(1). Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

(2). Kawasan hutana adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

(3). Perusakan hutan adalah porses,cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberianizin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

(4) Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Penetapan kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Bupati Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Penetapan Konservasi telah diperkuat dengan adanya hokum formal yang mengatur tentang hal serupa yaitu Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2015 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi. Akan tetapi setelah adanya perda yang mengatur tentang laranagan penggunaan kawasan hutan secara berlebihan perda ini merupakan perpanjangan tangan sebagai kekuatan hukum dari SK Bupati, masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

Meningkatnya permintaan akan kebutuhan kayu dari masyarakat menjadi faktor utama bagi oknum-oknum yang

tidak bertanggung jawab untuk melakukan penebangan hutan secara liar (*illegal logging)*yang akhir-akhir ini justru sering terjadi dikawasan hutan yang dilindungi seperti di kawasan konservasi.

Kawasan hutan konservasi yang berarti kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hal ini menunjukan bahwa seharusnya kawasan hutan konservasi dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya guna untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada dikawasan hutan tersebut. Terkait peraturan tentang pembatasan pemanfaatan hutan dikawasan konservasi, dari hasil pengamatan sementara di lapangan saat penulis melakukan pra survei serta informasi yang diperoleh dari berbagai artikel-artikel yang menjelaskan bahwa masih ada masyarakat yangbelummemahami betul bagaimana pemanfaatan hutan yang baik dan benar dikawasan konservasihal ini serupa seperti yang dituturkan Joko Kusmanto "Tata kelola yang diterapkan dalam wilayah TNDS tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar dan belum tersosialisasikan" ujarnya, menurutnya pihak TNDS dalam melakukan penertiban selalu main tangkap dan diproses tanpa ada kompromi. Hal ini menandakan kurangnya komunikasi dengan masyarakat terkait kebijakan tersebut sehingga nampak jelas ketidak-tahuan masyarakat mengenai fungsi dan pemanfaatan dari kawasan konservasi secara menyeluruh.

Masalah *illegal logging*yang masih erjadi didaerah hutan yang dilindungi salah satunya seperti yang terjadi kawasan konservasi ini menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitin di kawasan tersebut guna untuk menemukan informasi bagaimana implementasi Perda No 20 tahun 2015 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi sehingga belum berjalan secara optimal.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini ilaha, adanya masyarakat yang melanggar peraturan terkait pemanfaatan hutan secara berlebihan dikawasan TNBDS, kurangnya komunikasi antara agen pelaksana kebijakan dengan masyarakat terkait pembatasan pemanfaatan hutan, pengawasan didaerah kawasan konservasi belum dijalankan secara

optimal oleh para pelaksana kebijakan (implementor), dan faktor ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi faktor pendukung.

3. FokusPenelitian

Fokuspenelitianini ialah pada; sumberdaya, karakteristik, agen pelaksana, sukap/kecendrungan (disposisi) para pelaksana serta faktor lingkungan sosial ekonomi dan politik merupakan faktu-faktor yang mempengaruhi atau tidak Pelaksanaan

4. RumusanPermasalahan

Rumusan masalah dalam penelitianini yaitufaktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementsi kebijakan kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten konservasi belumberjalan segara optimal.

5. TujuanPenelitian

Adapun tujuan daripenelitian ini untukmengetahui danmendeskripsikan implmentasi kebijakan Peraturaan Daerah no.20 tahun 2015 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah, bagi dunia akademis dan pembaca diharapkan dampat memberikan manfaat perkambangan ilmu serta menjadi sumbangan pemikiran dan evaluasi dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan khususnya di bagian Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan kebijakan tentang perlindungan kawasan konservasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik berkaitan erat dengan implementasi, karena setiap ada implementasi pasti ada kebijakan yang harus diimplentasikan. Sebagai mana peraturan daerah yang dibuat pemerintah untuk negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan, cita-cita, prinsip, tujuan dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

David Easton (dalam Islamy, 1992:19), bahwa kebijakan publik hanya pemerintah yang secara syah berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa rencana, program, proyek, ataupun sebagai keputusan lain yang dikeluarkan suatu sistem administrasi untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan dapat diartikan secara umum sebagai suatu kebijakan (dalam Mustopadidjaja, 1992:17). Pada dasarnya terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,2008:142), model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas hulu Sebagai Kabupaten Konservasi

↓

Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Kabupaten Kapuas hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas hulu Sebgai Kabupaten Konservasi

↓

Identifikasi masalah

1. Adanya masyarakat yang melanggar peraturan terkait pemanfaatan secara berlebihan hutan di kawasan konservasi.
2. Kurangnya komunikasi anatara agen pelaksana kebijakan dengan masyarakat terkait pembatasan pemanfaatan hutan.
3. Lemahnya pengawasan di daerah kawasan konservasi oleh para pelaksana kebiijakan tersebut (implementor).
4. Faktor ekonomi masyarakat menengah kebawah menjadi salah satu pemicu oknum dari masyarakat melakukan penebangan hutan secara liar.
5. Karakteristik agen pelaksana yang tidak seimbang dalam mengimplementasikan kebijakan

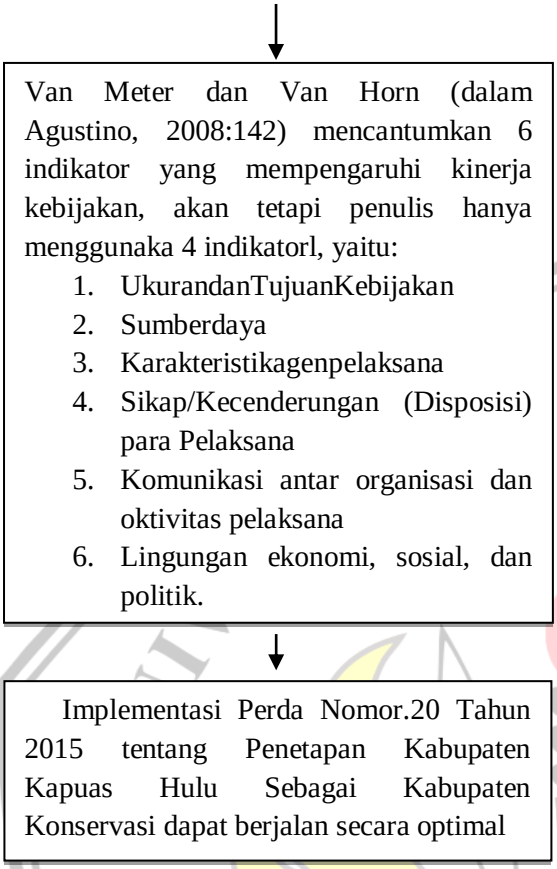

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan proses implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi berdasarkan data dan fakta. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2011:6) bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah."

Jenis penelitian Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan sesuai dengan apa yang ada saat penelitian ini dilakukan, dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian deskriptif ini menurut Moleong (2006:6) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum yang lebih sering/aktiv melakukan pegawasan dan pemantauan kawasan hutan khususnya wilayah konservasi. Selain itu terdapat faktor ketersedian data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Di dalam subjek penelitian terdapat data-data yang objektif yang berguna untuk menjawab fokus penelitian. Alasan mengapa sumber data tersebut disebut

subjek karena di peroleh dari orang-orang yang dipercaya dapat mewakili dalam memberikan informasi yang diperlukan selama proses penlitian.

Data yang diperlukan pada penelitian ini merupakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari informan terkait objek yang akan diteliti. Semntara data sekunder merupakan data yang sudaah diolah menjadi dokumen-dokumen resmi atau arsif seta jurnal-jurnal yang terkait objek penelitian. Pada penelitian ini sumber datanya meliputi:

a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kapuas Hulu 1 orang.
b. POLHUT Kapuas Hulu 1 orang.
c. Pegawai/staf Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) 4 orang.
d. Pemuka Adat 1 orang.
e. Masyarakat 2 orang.

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasikan menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2009:68) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activies* (aktivitas).

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini ialah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

D.HASIL PENELITIAN

1). Ukuran dan Tujuan KebijakanKantor

Ukuran dan tujuan kebijakan menurut Van Meter dan Van hornyang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang memang ada dilevel pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu kecil (bahka terlalu utopis) unutk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang unuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Setelah dilakukan penelitian secara langsung dilapangan peneliti mendapatkan data dan fakta yang mengatakan bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan memang sudah sesuai dengan daerah pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu, dilakukan dilevel warga masyarakat

disekitar kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Akan tetapi implementasi kebijakan ini belum tercapai seperti yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan pasti tentang adanya kebijakan Peraturan Daerah tersebut terlebih mengenai pembatasan wilayah yang jelas. Banyaknya kasus penebangan hutan dikawasan konservasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu faktor kegagalan kebijakan tersebut.

2). Sumber Daya

Keberhasilan proses implemntasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Keberadaan sumberdaya memebrikan nilai serta peranan yang sangat penting terhadap suatu organisasi maupun instansi dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan dari kebiajan itu sendiri. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menetukan suatu keberhasilan proses implemnatsi.

a. Sumber Daya Manusia

   Merupakan sumberdaya yang memiliki peran utan yaitu staff yang diharapkan dapat mewujudkan kamampuan unit layanan publik dalam melakukan tugasnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Apabila semua tugas pokok, fungsi dan wewenang dilaksanakan dengan baik maka kinerja dari pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam kegiatan oprasional dalam mencapai tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan. Semnatara itu dilihat dari fakta yang didapatkan dilapangan saat peneliti melakukan penelitian diketahuibahwa staff yang dimiliki oleh instansi yang terkait memang sudah cukup memadaimeski terdapat beberapa staff lain yang memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada . tetapi hal ini dapat mereka imbangidnegan mengikuti beberpa pelatihan yang berkaitan denagn system-sitem untuk meningkatkan kulitas kinerja staffnya.

b. Sumber Daya Waktu

   Sumber daya waktu berkaitan denagn kuantitas yang tersedia untuk melaksanakan suatu program, dari hasil penelitian memiliki kesimpulan bahwa sumberdaya waktu yang dikelola oleh instansi yang terkait

emamng sudah berjalan dengan baik, mengingat waktu pelaksanaan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, meskipun masih ada beberapa yang mungkin memang tidak bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan khususnya unutk pelaksanaan sosialilsasi program atau kebijakan.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber daya keuangan tidak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia. Sumber daya keuangan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar kegiatan administrasi ataupun kegiatan operasional implementasi suatu kebijakan. Sumber daya keuangan terdiri atas dana ataupun intensif yang dapat memberikan kelancaran terhadap implementasi suatu kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya anggaran yang dimiliki akan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.Semntara itu pada penelitian ini, setelah dilakukan penelitian secara langsung dilapangan peneliti mendapatkan data dan fakta yang mengatakan bahwa dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di Taman Nasional Danau Sentarum ini masih kurang, serta perlu dilakukan penambahan tenaga untuk pengawasan dilapangan guna untuk mengoptimalkan penjagaan di kawasan Taman Nasional tersebut. Selain itu sumberdaya finansial dan juga sumberdaya waktu memang sudah dimaksimalkan oleh agen pelaksana sesuai dengan anggaran dan waktu yang ditetapkan namun kekurangan yang ada pada sumberdaya manusia menyebabkan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konseervasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum in tidak berjalan dengan maksimal. Dari hal

ini dapat di gambarkan jika ketersediaan sumberdaya manusia juga memegang peranan penting dalam keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Dalam artian memerlukan keseimbangan antara ketersediaan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya keuangan/financial supaya kebijakan dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang ditetapkan bisa berjalan dengan baik.

3). Komunikasi antar Organisasi dan Aktivita Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi ebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi.

Komunikasi setiap hubungan antar organisasi terkait dapat saling berkoordinasi dan saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan analisis dan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti mengatakanbahwa komunikasi antar organisasi dalam hal ini belum berjalan dengan baik dan pada konteks penyampaian informasi terkait isi, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal bahkan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konseervasi Khususnya di Taman Nasional Danau Sentarumpara agen pelaksana mereka yang menjalankan tugas dan programnya berpegeng pada dasar hukum yang berbeda-beda dan menerima wewenang pemerintah yang berbeda juga.

4). Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasikan kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Struktur birokrasi dalam hal ini mempunyai tugas mengatur para aliran pekerjaan dalam implementasi suatu

kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam implementasi suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab di antara beberapa sub bagian, unit pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sementara dari hasil analisi dan pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Karakteristik Agen Pelaksana yang ada pada masing-masing agen pelaksana kebijakan yang terkait, dapat dikatakan bahwa memang ketegasan dalam menjalankan tugasnya sudah cukup menyakinkan dengan adanya penerapan kedisiplinan dan lainnya, namun belum cukup efektif karena kasus ilellegal loging yang masih sering terjadi dikawasan konservasi selain itu juga masih adanya konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan tersebut juga sangat mengkhawatirkan dan masih jauh dari tujuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di Taman Nasional Danau Sentarum belum berjalan dengan efektif.

5). Lingkungan, sosial, dan ekonomi

Dari perspektif kondisi ekonomi timbul dari kecenderungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang pada hakekatnya apakah tindakan mereka bertentangan dengan tujuan dari kebijakan. Bisa jadi kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh pertentangan antara kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat baik itu dari ekonomi terhadap tujuan kebijakan yang akan dicapai.Demikian juga yang terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan konservasi kondisi perekonomiannya bisa saja menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konseervasi Khususnya di Taman Nasional Danau Sentarum.

Setelah dilakukan pengamatan secara langsung serta analisi data yang diperoleh dari lapangan diketahui bahwa lingkungan ekonomi itu berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi, teruatma yang berkaitan dengan perlindungan kawasan konservasi, menjaga ekosistem serta mensejahterakan masyrakat. Tindakan yang dilakukan oleh oknum pembalakan hutan ini berakibat fatal dalam jangka panjang. Perlindungan

kawasan konservasi sangat penting karena jika rusaknya hutan dikawasan tersebut sedikit banyaknya dapat berimbas kepada keadaan alam yang menyebab perubahan musim yang tidak menentu, hal ini tentu saja merugikan banyak pihak terutama para nelayan tradisonal yang pengaruhh terhadapa kondisi alam disekitar mereka.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab yang menghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum dengan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, danlingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

   Di dalam implementasi ukuran dan tujuan kebijakan bahwa dilihat dari tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut belum berhasil karena masih terdapat kasus-kasus penebangan hutan secara liar di kawasan konservasi, selain itu masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi tersebut masih tidak begitu mengeti tentang kebijakan yang mengatur tetang laranag pemanfaatan hutan secara berlebihan.

2. Sumberdaya

   Bahwa sumberdaya yang dimiliki dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini sumberdaya manusia masih kurang, dan perlunya penambahan tenaga khusunya pengawasan dilapangan, hal ini tentu dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya. Kekurangan-kekurangan sumberdaya tersebut tentu dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan sehinggan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional

Danau Sentarum belum terlaksana dengan baik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

   Para agen pelaksana dari kebijakn Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum selaku implementor sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya namun belum bisa dikatakan maksimal, meski mereka sudah memberikan himbauan maupun pemahaman kepada masyarakat, namun masih terdapat masyarakat yang tidak mengeti mengenai isi dari kebijakan atau bahkan sanksi-sanksi yang terdapat didalam kebijakan tersebut.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

   Dalam implementasi kebijakanPeraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum komunikasi antara para pelaksana masih sangat buruk karean kejelasn dari perda tersebut juga tidak ada penunjukan secara spesifik instasni mana yang terkait dalam menjalankan kebijakan ini. Pengawasan pemantauan serta penindakan kejadian yang terjadi dikawasan konservassi Taman Nasioan Danau Sentarum itu di lakukan oleh pihak yang bahkan menerima kewenang yang berbeda bukan berasal dari pemerintah daerah kabupaten kapuas hulu saja. Dikarenakan komukasi antar agen pelaksananya yang tidak terjalin dengan baik, mengakibatkan komunikasi kepada masyarakat seperti penyampaian sosialisasi masih minim sehingga masyarakat tidak memahami isi dari kebijakan tersebut.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

   Bahwa lingkungan ekonomi sangatberpengaruh sekali terhadap keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Karena sebagian besar masalah yang terjadi dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat, seperti kasus illegal loging hal yang mungkin menjadi pemicu

terjadinyapembalakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab ini lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi.

2. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
   Kerusakan hutan yang sudah terjadi yang diakibatkan oleh pembalakan menjadi masalah serius, dan perlu di tangani dengan lebih serius lagi oleh instansi pemerintah daerah dan pihak swasta yang terkait agar dapat bekerja sama memberantas illegal loging hingga bisa mnyelamatkan hutan yang menjadi warisan penting bagi genarsi yangakan datang.
2. Sumberdaya
   Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum memerlukan sumberdaya yang memadai, baik itu sumberdaya manusia sebagai tenaga pendidik, perlunya penambahan dan pemerataan tenaga di berbagai sektor demi memperbaiki kinerja kedepannya.
3. Karakteristik Agen pelaksana
   Perlunya peningkatan ketegasan dari pelaksana dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Agar dapat memberikan kesan atau efeka jera bagi masyarakat.
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
   Komunikasi yang terjalin antara implementor harus diperjelas agar dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan semestinya walupun mungkin tidak mencapai hasil akir yang memuaskan namu

kerja sama mereka dapat menunjang keberhasilan yang menjadi tujuan dari kebijakan ini.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

   Lingkungan sosial dan politik yang mungkin tidak begitu berpengaruh dalam melaksanakn kebijakan ini, namun juga perlu pertimbangan bagaimana kedepanya faktor tesebut dapat mengurangi lingkongan ekonomi yang lebih mendominasi pengarunya terhadap pelaksanaan kebiakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi khususnya di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

F. REFERENSI

Buku-buku :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabet Bandung.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Seti.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.

Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grava Media.

Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, teori, dan Isu.* Yogyakarta, Gavamedia.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya.

Mustopadidjaja. A. R. 1992. *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan, dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP FEUI

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.

Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.

Wahab, Solihin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winanrno, Budi. 2014. *Kebijakan*

Penduduk (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: PT Buku Seru

Sumber Lain Yang Digunakan:

Jurnal :

Diantoro, TW. (2010).*Perambahan Kawasan Hutan Pada konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 23(3),*431-645.

Nordiansyah, H. (2016).*Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Cagar Alam Padang Luway Kabupaten Kutai Barat. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945,15(1),* 53-54.

Peraturan Perundang-Undangan:

Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Internet:

Sahirul, H. (2018). *Camat Suhait Marah Pengelolaan TNDS Tidak Memperhatikan Masyarakat.* Diakses pada 10 April 2018, dari http://pontianak.tribunnews.com/2018/02/07/camat-suhaid-marah-pengelolaan-tnds-tidak-memperhatikan-kebutuhan-masyarakat(diakses pada tanggal 10/04/2018)

Statistik 2017 BBTNBKDS

Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014